

ANALISIS CITRA POLITIK DPRD KALTIM MELALUI RUBRIK PARLEMENTARIA DI KORAN TRIBUN KALTIM

Aulia Umma Fad¹

Abstrak

Pemberitaan mengenai DPRD Kaltim selama ini cukup buruk di mata masyarakat Kalimantan. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi pada HA, IM, AT, AS, AH, HO dan YT. Tujuh orang tersebut dianggap terlibat dalam perencanaan pembentukan rekening Ketua DPRD Kaltim terkait dana penunjang operasional dewan. Dan tentunya hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap anggota DPRD Kaltim. Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, maka DPRD Kaltim terus melakukan upaya untuk menaikkan citra. Salah satunya dengan pemberitaan di Rubrik Parlementaria Koran Tribun Kaltim.

Tujuan yang hendak dicapai peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan wartawan dalam membingkai berita yang mencitrakan anggota DPRD Kaltim melalui rubrik parlementaria di Koran Tribun Kaltim dengan menggunakan teori analisis Framing konsep Robert N. Entman. Yaitu dengan pendefinisian masalah, memperkirakan masalah, keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah tim media DPRD Kaltim yang terdiri dari tiga orang wartawan, dan dua orang redaktur.

Hasil analisis pertama menunjukkan bahwa citra yang digunakan oleh anggota DPRD Kaltim melalui rubrik parlementaria DPRD Kaltim ialah dengan memberitakan kegiatan-kegiatan positif dari anggota DPRD Kaltim. Dan analisis kedua ialah peneliti melihat bahwa wartawan dalam menulis berita tersebut sangat mengesampingkan nilai-nilai berita di dalamnya.

Kata Kunci: Anggota DPRD, Citra, Berita, Pandangan Wartawan, Nilai Berita, Bingkai Berita.

Pendahuluan

Buruknya Citra Politik DPRD sudah terbukti dengan berdasarkan survey pemetaan capres 2014 oleh Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan menjelaskan, Citra buruk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga paling korup di Indonesia. DPR juga dinilai sebagai tempat mencari nafkah bagi

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Email: auliaumma.apakabar@gmail.com

politikus. Survey yang dilakukan terhadap oleh 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi menunjukkan responden yang memilih DPR sebagai lembaga paling korup adalah sebanyak 1.030 responden atau 47 persen dari 2.192 responden. DPRD Kaltim salah satunya, dengan terbuktinya Enam tersangka dugaan kasus korupsi tersebut telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian tim kejadi kaltim. Sebelumnya DPRD Kaltim telah menetapkan tiga tersangka yang kemudian telah dinyatakan bersalah melalui pengadilan masing-masing Ketua DPRD (periode 1999-2004), yakni Sukardi Djarwoputro (PDIP), dan dua orang wakil ketua masing-masing Kasyful Anwar As`ad (Golkar) dan Chairul Fuad (PPP).

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, untuk terdakwa Sukardi Djarwo Putro, Khairul Fuad dan Kasyful Anwar As`ad menyebutkan tujuh anggota dewan berjemaah melakukan korupsi, yaitu HA, IM, AT, AS, AH, HO dan YT. Tujuh orang tersebut dianggap terlibat dalam perencanaan pembentukan rekening Ketua DPRD Kaltim terkait dana penunjang operasional dewan.

Berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan, bahwa enam tersangka baru ini merupakan "kloter kedua", nantinya mantan anggota dewan periode 1999-2004 secara bertahap akan dinyatakan sebagai tersangka. (Merdeka.com)

Tersangka dinilai melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 21/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 (1) KUHP. Sebagai wakil rakyat di daerah, maka kinerja anggota DPRD Provinsi akan lebih mudah dianalisa oleh masyarakat jika dibandingkan dengan DPR Pusat. Oleh karena itu, maka secara langsung maupun tidak langsung citra DPRD Provinsi adalah cerminan dari citra keseluruhan wakil rakyat di Pusat.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada beberapa oknum DPRD seperti kasus korupsi, tindakan amoral, maupun yang menyalahi norma masyarakat menjadikan citra DPRD menjadi buruk. Hal ini tentunya bukanlah sebuah hal yang bagus dalam menjalankan sebuah sistem yang nantinya akan berhubungan dengan sistem pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan peneliti, maka peneliti memutuskan untuk meneliti Analisis Citra Politik DPRD Kaltim Melalui Rubrik Parlemenaria di Koran Tribun Kaltim.

Kerangka Dasar Teori

Citra Politik

Menurut Robert (1977) dalam Jalaluddin Rakhmat (2008 : 223) citra merupakan "*representing the totality of all information about the world any individual has processed, organized and stored*" yang berarti menunjukkan keseluruhan informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan individu.

Citra adalah peta Anda tentang dunia. Tanpa citra anda akan selalu berada dalam suasana yang tidak pasti. Citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak akan selalu sesuai dengan realitas. Citra adalah dunia menurut persepsi kita.

Walter Lippman (1965) dalam Jalaluddin Rakhmat (2008 : 223) menyebutnya “*pictures in our head*”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa citra merupakan sekumpulan, keyakinan, ide, kesan, perspsi dari seseorang, suatu komunitas atau masyarakat terhadap suatu produk, merek, figure politik, organisasi, perusahaan, dan bahkan Negara yang dibentuk melalui suatu proses informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber.

Citra politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, autoritas, konflik dan konsensus) yang memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Anwar Arifin (2006 : 2)

Citra politik berkaitan juga dengan sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup beberapa hal yaitu : (1) seluruh pengetahuan politik seseorang (kognitif), baik benar maupun keliru; (2) semua preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik; (3) semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu. Justru itu citra politik selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang.

Teori Agenda Setting

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai teori agenda setting, penulis akan memberikan kesamaan mengenai teori agenda setting dengan analisis framing.

Menurut Dennis McQuail (2000 : 495) mendefinisikan bahwa *framing* sebagai “sebuah istilah yang mempunyai dua makna, pertama merujuk pada cara sebuah isi berita dibentuk secara khusus dan dikontekstualisasikan oleh jurnalis dalam bingkai lazim dari referensi dan berdasar pada struktur yang laten dari makna. Kedua, yaitu berhubungan dengan memusatkan perhatian pada efek *framing* pada publik. Para audiens memberikan perhatian untuk mengangkat referensi dari *framing* yang ditawarkan oleh jurnalis dan melihat dunia dengan kemiripan, proses ini lebih berelasi dengan teori *agenda-setting*”.

Bahkan Iyengar dan Kinder (1987) menggunakan istilah ini sama dengan istilah *agenda setting* dan *framing*. Belakangan McCombs, Shaw dan Weaver (1997) mengatakan bahwa tidak saja *agenda setting* dan *framing*, sebagai pengaruh media, yang memiliki keterkaitan tetapi *framing* sebenarnya merupakan kelanjutan dari *agenda setting*.

Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippman (1965) dalam Jalaluddin Rakhmat (2208:228) pada konsep “*The World Outside and the Picture in Our Head*”. Penelitian empiris teori ini dilakukan Mc Combs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara

lain walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita, ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita.

a. Agenda media terdiri dari dimensi-dimensi berikut.

1. *Visibility* (visibilitas), yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita.
2. *Audience salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.
3. *Valence* (valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.

b. Agenda Khalayak, terdiri dari dimensi-dimensi berikut.

1. *Familiarity* (keakraban), yakni derajat kesadaran akan topik tertentu.
2. *Personal Salience* (penonjolan pribadi), yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi.
3. *Favorability* (kesenangan), yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita.

c. Agenda Kebijakan terdiri dari dimensi-dimensi berikut.

1. *Support* (dukungan), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu.
2. *Likelihood of Action* (Kemungkinan Kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.\
3. *Freedom of Action* (Kebebasan Bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis framing. Secara umum metode analisis framing yang dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memahami bagaimana realitas dibingkai oleh media. Pawito (2009 : 50) Framing merupakan strategi konstruksi dan simplifikasi realitas sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada pembaca. Peristiwa-peristiwa diatur sedemikian rupa dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Anggapan dasar analisis framing ialah bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara *taken for granted*, melainkan sesuatu yang dimaknai dan dikonstruksi dengan fakta tertentu. Fokus pembahasan analisis *framing* terletak pada bagaimana cara media untuk memahami realitas dan mengkonstruksi makna-makna realitas, serta bagaimana cara media menyajikan realitanya sebagai sebuah pemberitaan di media.

Istilah *framing* di sini cenderung banyak dipakai untuk menunjuk gejala-gejala yang kendatipun sama atau mirip namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya Wicks (1992) menggunakan istilah *framing* untuk menunjuk kategori-kategori kognisi yang ada pada khalayak, Hamili dan Lodge (1986) memahami *framing* mirip dengan yang sering dikonsepsikan dengan *frame*,

script atau *schema*. Iyengar dan Kinder (1987) menggunakan istilah ini sama dengan istilah *agenda setting* dan *framing*. Belakangan McCombs, Shaw dan Weaver (1997) mengatakan bahwa tidak saja *agenda setting* dan *framing*, sebagai pengaruh media, yang memiliki keterkaitan tetapi *framing* sebenarnya merupakan kelanjutan dari *agenda setting*.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing dengan jenis penelitian analisis framing dan menggunakan perangkat framing dari Robert N. Entman. Dalam Eriyanto (2012 : 221) Entman melihat framing dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan dalam hal ini adalah proses untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di-*headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak di bawa kemana berita tersebut.

Nantinya peneliti akan menggunakan konsep dari seleksi isu dan penonjolan aspek untuk mewawancarai wartawan humas DPRD Kaltim. Dan konsep Entman.

Dalam Eriyanto (222 : 2012) dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dan dalam konsep Entman mengenai Pendefinisian Masalah, Memperkirakan masalah atau sumber masalah, Membuat Keputusan moral, dan Menekaikan Penyelesaian akan digunakan peneliti untuk menganalisis pbingkaian berita dalam rubrik Parleментарia di koran Tribun Kaltim pada tanggal 28 Februari hingga 9 Maret 2014.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang telah disusun oleh peneliti lebih didasarkan pada fokus penelitian yaitu mengenai pemberitaan citra DPRD Kaltim melalui rubrik parlementaria di koran Tribun Kaltim.

Peneliti melakukan analisis *framing* terhadap pemberitaan citra DPRD Kaltim melalui rubrik parlementaria di koran Tribun Kaltim dengan menggunakan perangkat *framing* konsepsi dari Robert N. Entman (Eriyanto, 2012 : 223) yaitu dengan mewawancarai humas DPRD Kaltim atau para pencari berita mengenai

DPRD Kaltim di sejumlah media tak terkecuali media Tribun Kaltim. Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti juga akan menganampilkan sejumlah berita dan daftar berita dari koran Tribun Kaltim pada tanggal 28 Februari hingga 9 Maret 2014 atau tepatnya 10 hari menjelang pemilihan Legislatif.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, peneliti akan menganalisis isi berita rubrik parlementaria DPRD Kaltim serta mewawancarai wartawan dan redaktur humas DPRD Kaltim guna mengetahui bagaimana Tim Media Humas DPRD Kaltim dalam pembingkaiian berita.

Peneliti akan membagi analisis menjadi beberapa bagian sesuai dengan perangkat framing Robert N. Entman, dan nantinya akan disimpulkan secara keseluruhan hasil dari analisis *framing* yang dilakukan peneliti

Analisis Framing Berita Rubrik Parlementaria DPRD Kaltim

Tanggal : 28 Februari 2014

a) Judul : Perjuangkan Makanan Layak Konsumsi Hingga ke Pusat

Definisian Masalah

Peneliti melihat bahwa wartawan menekankan permasalahan kepada BPOM RI, karena dianggap lalai dalam pengawasan makanan yang masuk ke Indonesia. Dan membuat anggota DPRD Kaltim khawatir apabila tidak ditangani secara serius, maka masyarakat Kaltim akan mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya khususnya jajanan anak-anak. Dan dari judul tersebut sangat menunjukkan bahwa antusiasme anggota DPRD Kaltim komisi IV sangatlah tinggi dalam memperjuangkan makanan layak konsumsi ke pemerintah pusat.

Sumber Masalah

Peneliti melihat bahwa wartawan menuliskan aktor di balik permasalahan tersebut ialah BPOM RI, anggota DPRD Kaltim menganggap bahwa BPOM RI kurang jeli dalam mengawasi makanan yang masuk ke Indonesia, sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia mengkonsumsi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam makanan tersebut tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari pemerintah pusat.

Keputusan Moral

Peneliti melihat bahwa wartawan menekankan adanya keluhan dari DPRD Kaltim dalam berita tersebut dikarenakan kelalaian BPOM RI dalam mengawasi makanan yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak mungkin adanya pertemuan tersebut yang berisi keluhan kalau BPOM RI serius dalam menangani pengawasan yang masuk ke Indonesia. Dan berita tersebut diangkat karena menyebarkan makanan tak layak konsumsi di kalangan masyarakat luas.

Menekankan Penyelesaian

Penyelesaian yang ditawarkan menurut sudut pandang wartawan dalam kasus tersebut ialah BPOM RI harus serta merta menanggapi secara serius keluhan dari anggota DPRD Kaltim Komisi IV yang mendatangi BPOM Pusat demi kelayakan komisi IV yang mendatangi BPOM Pusat demi kelayakan konsumsi masyarakat Kaltim.

b) Judul : ***Sekretariat DPRD lanjutkan kerjasama : Upayakan Peningkatan Kapasitas di Bidang Perdata dan Tata Usaha***

Definisi Masalah

Peneliti melihat bahwa berita kunjungan tersebut ditulis wartawan untuk menunjukkan keseriusan Sekretariat DPRD Kaltim dalam mengelola manajemennya. Dan peneliti melihat bahwa wartawan menonjolkan sisi penghargaan kepada Sekretariat DPRD Kaltim, karena sudah empat tahun melakukan kerjasama di bidang hukum dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. dan judul tersebut diangkat tentunya agar masyarakat melihat usaha sekretariat DPRD Kaltim dalam masalah hukum

Sumber Masalah

Dalam berita tersebut, peneliti melihat bahwa aktor penyebab peristiwa tersebut terjadi ialah Sekretariat DPRD Kaltim yang mendapat penghargaan untuk melanjutkan kerjasama kembali di tahun keempat dengan Kejaksaan tinggi Kaltim.

Keputusan Moral

Pilihan Moral atau elemen yang dipakai untuk pendefinisian masalah ini menurut peneliti yang ditonjolkan oleh wartawan ialah kesepakatan penandatanganan Kerjasama antara Sekretariat DPRD Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam bidang hukum.

Menekankan penyelesaian

Jalan Keluar yang ditawarkan dalam penulisan berita tersebut ialah Sekretariat DPRD Kaltim berharap kedepannya Kejati Kaltim akan memberikan masukan, konsultasi, *hearing* dan bimbingan dalam bentuk pertimbangan hukum kepada Sekretariat DPRD Kaltim.

Tanggal : 1 Maret 2014

a) Judul : **DPRD Kaltim Tuntut Kejelian BPOM RI**

Define Problems

Dalam berita tersebut peneliti melihat bahwa wartawan menilai banyaknya kasus-kasus peredaran luas makanan yang tidak bersertifikasi dan menyatakan aman untuk dikonsumsi semata-mata karena kurang jeliya BPOM dalam mengontrol makanan yang telah diperjual belikan. Dalam pertemuan tersebut juga peneliti melihat bahwa wartawan menonjolkan sisi kekhuatiran anggota DPRD Kaltim dalam peredaran luas makanan yang berbahaya dikonsumsi untuk masyarakat. Dan wartawan menampilkan bahwa dalam pertemuan tersebut DPRD terus menerus mendesak BPOM RI untuk mengatasi keresahan masyarakat akan peredaran makanan dan rumor-rumor yang tengah beredar mengenai jaminan keamanan makanan maupun produk kosmetik layak konsumsi.

Diagnose Cause

Aktor dalam permasalahan tersebut yang ditampilkan oleh wartawan tentu saja BPOM RI. Karena menurut penulisan wartawan, anggota DPRD Kaltim Komisi IV menuding BPOM RI lah yang lalai dan tidak jeli dalam pengawasan makanan yang masuk ke Indonesia dan tidak mengawasi makanan yang telah diperjual belikan dan bebas dikonsumsi khalayak umum.

Make Moral Judgment

Keputusan moral yang dipakai dalam kasus tersebut menurut pandangan wartawan ialah kelalaian dari BPOM RI yang diutarakan oleh anggota DPRD Kaltim Komisi IV. Dan keluhan yang ada tidak mungkin terjadi apabila BPOM RI selama ini melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengawasi dan mengontrol makanan maupun kosmetik dan barang layak konsumsi yang diperjual belikan di khalayak luas.

Treatment Recommendation

Elemen yang ditawarkan menurut sudut pandang wartawan yang peneliti analisa ialah anggota DPRD Kaltim Komisi IV berharap BPOM RI segera memberikan respon positif dan mengatasi keresauan masyarakat mengenai peredaran barang layak konsumsi yang telah menjamur di masyarakat. Dalam penyelesaian masalah tersebut, wartawan menampilkan bahwa BPOM RI seharusnya mengambil langkah secepat mungkin untuk mengatasi masalah yang terjadi dan BPOM RI harus tegas terhadap penjual-penjual makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan dalam menjual makanan.

Hasil Wawancara

1. Seleksi Isu

A. Akbar Pamungkas (Pewartanya DPRD Kaltim)

Subjek memandang bahwa isu yang harus diangkat ialah mengenai kinerja anggota dewan dan yang berhubungan dengan masyarakat banyak

B. Herlinda Y (Pewartanya DPRD Kaltim)

Subjek melihat bahwa isu yang wajib diangkat biasanya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan memunculkan kontroversi bagi masyarakat luas. Sehingga menuntut anggota DPRD untuk memberikan komentar terkait masalah yang ada dengan memberika solusi pemecahan masalah yang tepat sehingga memberikan citra positif anggota DPRD di mata masyarakat luas.

C. Lia Anggraeni (Pewartanya DPRD Kaltim)

Subjek mengangkat isu yang kontra dengan kebijakan pemerintah di mata masyarakat, sehingga komentar anggota DPRD akan memberikan kesan yang mendukung masyarakat sepenuhnya

D. Sabrina Rifani (Redaktur)

Subjek selaku redaktur menekankan untuk membahas isu dari kegiatan anggota DPRD yang bersifat pro terhadap masyarakat, ataupun komentar-komentar anggota DPRD yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang hangat terjadi di masyarakat dan membutuhkan jalan keluar yang dianggap tepat di mata masyarakat.

E. Abdhi Abdhian (Redaktur)

Redaktur akan memberikan penekanan kepada wartawan untuk mencari berita yang berhubungan dengan masyarakat luas, sehingga memancing komentar anggota dewan untuk memberikan solusi terbaik di mata masyarakat. Dan menurut redaktur karena rubrik parlementaria DPRD Kaltim merupakan rubrik berbayar, maka berita yang dimuat tentunya harus berita yang mencitrakan positif anggota DPRD Kaltim.

2. Penonjolan Aspek

A. Akbar Pamungkas (Pewartar DPRD Kaltim)

Subjek melihat bahwa penonjolan isu bisa diangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Contoh kasus misalnya tentang banjir di Samarinda. Sebagai sebuah ibukota provinsi Kalimantan Timur, tidak layak kota Samarinda yang sebagai *icon* itu mengalami persoalan yang mendasar di dalam suatu daerah. Yaitu Banjir, *nah* itu kan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Di sini Dewan tentu mempunyai hak untuk mengevaluasi yang bisa dikaitkan dengan program yang dianggarkan pada APBD Kaltim.

B. Herlinda Y (Pewartar DPRD Kaltim)

Subjek melihat bahwa penonjolan isu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah di masyarakat, selain itu juga dalam penonjolan isu, subjek biasanya menampilkan bagian permasalahan dari masyarakat agar dapat menanyakan pendapat dan usulan dari anggota DPRD

C. Lia Anggraeni (Pewartar DPRD Kaltim)

Subjek mengangkat penonjolan isu untuk diberitakan dari hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan fungsi anggota dewan yaitu pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah

D. Sabrina Rifani (Redaktur)

Subjek selaku redaktur menekankan agar memberikan penonjolan aspek pada berita yang sedang hangat terjadi dalam forum anggota DPRD Kaltim. Contohnya rapat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa isi rapat tersebut mementingkan kepentingan masyarakat Kaltim.

E. Abdhi Abdhian (Redaktur)

Abdhi Abdhian selaku redaktur akan memberikan penekanan kepada wartawan Tim Media untuk memberikan penonjolan aspek pada bagaimana anggota DPRD menyikapi persoalan dalam forum rapat.

Kesimpulan

1. Pemberitaan Citra politik di DPRD Kaltim merupakan pencitraan yang positif. Seperti yang peneliti analisis pada bab IV dari hasil penelitian menyatakan bahwa wartawan Tim Media DPRD Kaltim memberitakan kinerja dan nilai juang dari anggota DPRD Kaltim. Namun menurut hasil wawancara peneliti dengan redaktur, maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya apa yang diberitakan dalam rubrik parlementaria DPRD Kaltim sesuai dengan hasil kerja anggota DPRD Kaltim yang sesungguhnya
2. Citra yang diangkat cenderung berlebihan dan tidak mementingkan nilai-nilai berita di dalamnya. Menurut Luwi Ishara (2011 : 27) di dalam suatu berita harus terdapat : konflik ; bencana dan kemajuan ; dampak ; kemasyhuran atau popularitas ; segar/baru dan kedekatan ; Keganjilan ; Seks ; dan Aneka Nilai. Sedangkan dalam analisis peneliti melihat pada rubrik parlementaria DPRD Kaltim

3. Dalam berita yang di bingkai pada rubrik parlementaria Tribun Kaltim cenderung memojokkan kinerja pemerintah provinsi Kaltim, sehingga masyarakat yang membacanya dapat menilai sebelah mata mengenai kinerja provinsi Kaltim
4. Dalam berita tersebut peneliti melihat bahwa wartawan cenderung menuliskan sisi kesalahan dari pemerintah provinsi, pusat serta kota maupun kabupaten.
5. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan redaktur DPRD Kaltim, peneliti menyimpulkan bahwa penekanan berita memang sengaja di lakukan oleh tim media dan mengesampingkan pendapat dari sisi lawan apabila ada pertemuan antara DPRD Kaltim dengan instansi lain
6. Peneliti melihat media yang memberitakan mengenai Citra politik DPRD Kaltim tidak menggunakan nilai-nilai jurnalisme yang sesungguhnya
7. Minimnya pekerjaan yang dilakukan anggota DPRD dapat tertutupi oleh berita-berita yang ada di rubrik Parleментарia

Saran

1. Perlunya penekanan nilai-nilai jurnalistik pada tiap media yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Terlebih masyarakat hanya melihat pemberitaan positif dan kerja keras dari DPRD Kaltim namun nyatanya tidak sama persis dengan kondisi yang sebenarnya..
2. Sebaiknya pemberitaan mengenai citra DPRD Kaltim harus diseimbangkan dengan kinerja anggota DPRD, walaupun rubrik tersebut merupakan rubrik berbayar namun hal ini berkaitan dengan penginformasian kepada khalayak luas, dimana seharusnya fungsi media dapat menginformasikan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan kepada khalayak luas, namun dengan adanya pemberitaan yang ada justru membuat masyarakat minim kritikan membangun kepada anggota DPRD Kaltim.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Human Relation dan Public Relation*. Bandung : Mandar Maju
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS
- Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Ananalisi Data*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ishara, Luwi. 2911. *Jurnalisme Dasar*. Yogyakarta : Penerbit Buku Kompas (PBK)
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Littlejohn, S.W., dan Foss, K.A. 2005. *Teori Komunikasi Edisi 9*. Jakarta : Salemba Humanika

- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Rosda
- Maleong, J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Maleong, J. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- McQuail, Denis. 2000. *Mass Communication Theory*. Jakarta : Erlangga
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1997. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Nuruudin, Msi. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nova, Firsan. 2011. *Membangun Citra dan Reputasi Perusahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, Jakarta Rajawali Pers
- Pawito. 2009. *Komunikasi Politik : Media massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta : Jalasutra
- Santoso, Edi & Mite Setiansah. 2010. *Teori Komunikasi*. Purwokerto : Graha Ilmu
- Severin, J. Werner & James W. Tankard, Jr. 2008 *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya : Kencana Prenada Media Group
- Wahyuni, Siti Nursih. 2013. *Komunikasi Massa*. Serang : Graha Ilmu
- West, Richard & Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi Buku 1 -3/E*. Jakarta : Salemba Empat

Sumber Internet

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> , di akses pada tanggal 16 Januari 2011
- <http://library.binus.ac.id/bab2.pdf> , di akses tanggal 12 Agustus 2014
- <http://id.wikipedia.org/wiki/all-about-theory.blogspot.com/pengertian-surat-kabar.html> , di akses pada tanggal 14 Agustus 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tribun_Kaltim , diakses pada tanggal 15 Agustus 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Anggota_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah diakses pada tanggal 15 Agustus 2014
- <http://digilib.upnjatim.ac.id/files/disk1/3/jiptupn-gdl-ramdhandw147-6-babiii.pdf> , diakses pada tanggal 30 Agustus 2014
- <http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/enam-tersangka-baru-korupsi-berjemaah-di-dprd-kaltim-l0niobw.html>, diakses pada tanggal 18 September 2014
- <http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/07/06/vonis-percobaan-bagi-terdakwa-korupsi-telah-jadi-jurisprudensi/>, diakses pada tanggal 18 September 2014
- <http://infokorupsi.com/id/geo-korupsi.php?ac=554&l=provinsi-kalimantan-timur&p=Qg%3D%3D>, diakses pada tanggal 18 September 2014
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127322-RB01P438pa-Pandangan%20Kompas-Methodologi.pdf> diakses pada tanggal 23 September 2014

<http://kikyzuki.blogspot.com/2009/08/caleg-terpilih-dprd-kaltim-20092014.html>
diakses pada tanggal 28 November 2014